



## Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural dalam Pembinaan Keberagaman Masyarakat Indonesia

**Julita Widya Dwintari**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

*Juulita18@gmail.com*

### Abstract

*Indonesia is a country that has a lot of diversity in society. Diversity is often seen as a difference, the difference being sharpened and often used by some to fulfill the ambitions and interests of the individual or group. This led to horizontal conflicts that led to the decline of the Indonesian nation, and the occurrence of riots everywhere. The purpose of this article is to describe the urgency of Civic Education based on multicultural in fostering the diversity of Indonesian society. This research method is literature review. Multicultural based Citizenship Education (PKn) plays a very important role in fostering the diversity of Indonesian society so that diversity is not a source of conflict, but rather as a basis in tolerating and respecting the diversity that exists in order to realize the state of Indonesia with Unity in Diversity. Civic learning based on multicultural education is a simple method and strategy, in order to create the character of the nation's children who can live in the nuances of difference. Therefore, in the learning process students should be brought closer to the community, life and mutuality in society. Students should be familiar and trained in dealing with and solving existing diversity problems in society. Civics teachers must make a self-transformation and self-restoration to prepare themselves for guarding and teaching on a multicultural basis. Teachers should get guidance and direction in order to play a maximum role so that multicultural education can be implemented through Civics well. Multicultural education in both Civics and other subjects should be improved especially in former conflict areas and areas with considerable potential to prevent a recurrence of the conflict.*

**Keywords:** Diversity, Civic Education, Multicultural Education

### Abstrak

*Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman sering dipandang sebagai perbedaan, perbedaan semakin dipertajam dan sering dimanfaatkan sebagian orang untuk memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi atau golongannya. Hal Ini menimbulkan konflik horizontal yang menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia, dan terjadinya kerusuhan dimana-mana. Tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan urgensi Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia. Metode penelitian ini adalah kajian pustaka. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis multikultural memegang peranan yang sangat penting dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru*



*sebagai dasar dalam bertoleransi dan saling menghargai keberagaman yang ada demi mewujudkan negara Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikultural merupakan satu metode dan strategi sederhana, dalam rangka menciptakan karakter anak bangsa yang bisa hidup dalam nuansa perbedaan. Oleh karena itu dalam proses pembelajarannya siswa harus didekatkan dengan masyarakat, kehidupan dan permasalahan dalam masyarakat. Siswa harus terbiasa dan telatih dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Guru PKn harus melakukan transformasi diri dan restrospeksi diri untuk mempersiapkan dirinya mengawal dan mengajar dengan basis multikultural. Guru harus mendapat bimbingan dan arahan agar dapat berperan secara maksimal sehingga pendidikan multikultural dapat diimplementasikan melalui PKn dengan baik. Pendidikan multikultural baik dalam PKn maupun mata pelajaran lain sebaiknya ditingkatkan pelaksanaannya khususnya di daerah bekas konflik dan daerah yang memiliki keberagaman yang banyak guna mencegah terulangnya kembali konflik tersebut.*

**Kata Kunci:** Keberagaman, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Multikultural

## **I. Pendahuluan**

Indonesia adalah bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, agama dan budaya. Masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat multikultural karena anggotanya terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya yang beragam. Multikulturalisme merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, sebagai potensi yang harus dikembangkan dan dibina. Sebaliknya apabila keberagaman ini tidak dimanfaatkan dan dibina secara benar akan berkembang menjadi suatu yang menakutkan. Oleh karena itu pendidikan yang berbasis multikultural merupakan suatu keharusan untuk membina keberagaman tersebut. Dulu keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang paling dibanggakan, dibangun atas dasar tujuan dan kepentingan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia.

Saat ini, keberagaman sering dipandang sebagai perbedaan, perbedaan semakin dipertajam dan sering dimanfaatkan sebagai orang untuk memenuhi ambisi dan kepentingan pribadi atau golongannya. Ini menimbulkan konflik horizontal yang menyebabkan terpuruknya bangsa Indonesia, kerusuhan terjadi dimana-mana. Indonesia sebagai negara yang sangat plural memiliki sejarah konflik multikultural seperti Konflik Poso yang terjadi sejak 1998, Bom Bali tahun 2000, Konflik Sampit yang terjadi Tahun 2001, dan Konflik Mesuji 2003. Tercatat dari tahun 2014 ada 74 kasus intoleransi beragama, tahun 2015 tambah menjadi 87 kasus, dan tahun 2016 lebih dari 87 kasus (Zulfikar, 2017), serta berbagai konflik berdasar agama, suku, maupun ekonomi lainnya. Sementara, akhir-akhir ini konflik tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan, bukan semata terjadi karena perbedaan agama, etnik atau budaya, tetapi karena perbedaan ideologi dan kepentingan

Tawuran dan bentrokan terjadi di mana-mana, antarpendukung kesebelasan sepak bola, tawuran antamahasiswa. Tawuran antarpelajar, dan tawuran antarkelompok seperti yang baru terjadi tanggal 9 November 2017 di di Jembatan Persakih Kelurahan



Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, yang melibatkan grup Persakih dengan Kampung Duri Kosambi hingga menyebabkan satu orang tewas (Arifin, 2017). Tawuran antarsuporter bola juga sempat terjadi pada 11 Oktober 2017 antarsuporter PSMS Medan versus Persita Tangerang yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 18 orang luka. Tawuran-tawuran tersebut menunjukkan bahwa rasa kebersamaan warga masyarakat sudah hilang, yang ada perbedaan ideologi dan kepentingan, apabila berbeda kepentingan dan ideologi dianggap lawan (Tim Viva, 2017).

Keberadaan kepentingan, golongan dan ideologi ini semakin tajam dan mengarah pada konflik antarkelompok. Kelompok yang satu tidak mau lagi hidup berdampingan dengan kelompok lainnya. Keberagaman yang semula menjadi kebanggaan bisa berubah menjadi suatu yang sumber konflik yang menakutkan, yaitu terganggunya stabilitas nasional dan disintegrasi bangsa. Pendidikan mempunyai peranan sebagai pencegah agar konflik dan kerusuhan seperti itu tidak berkelanjutan. Karakteristik masyarakat multikultural harus tercermin dalam sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang mengakomodasi multikultural dan pluralism sesuai dengan tuntutan undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakomodasikan semangat multikultural tercantum dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Mengingat penyelenggaraan pendidikan memerlukan kurikulum, maka nilai-nilai multikultural tersebut harus dijadikan dasar dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum suatu lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural di dalam kurikulum, dapat diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi dan tujuan, siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai sikap dan moral.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sentral dalam membangun kesatuan memiliki peran dalam membentuk generasi muda sebagai mana pendapat Kerr (1999: 17) yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ditafsirkan secara luas mencakup persiapan peran dan tanggung jawab pemuda sebagai warga negara melalui sekolah, pengajaran dan pembelajaran. Pengertian tersebut menggambarkan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam membina warga negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang memahami tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika, untuk itu PKn memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan



merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi.

Mengingat masyarakat Indonesia yang sangat plural, maka Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membina keberagaman masyarakat di Indonesia tersebut dengan mengintegrasikan pendidikan multikultural di dalamnya, dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah mendeskripsikan urgensi pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultural dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kajian pustaka dengan mengkaji berbagai tulisan baik buku maupun jurnal yang terkait dengan pendidikan PPKn, pendidikan multikultural, dan keberagaman masyarakat Indonesia yang didapatkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal internasional dan nasional dengan model analisis induktif.

## **III. Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan**

Somantri (2001: 299) mendefinisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertujuan untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang bisa digambarkan dengan warga negara yang berjiwa patriotik, mempunyai rasa toleransi yang tinggi, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis dan berjiwa Pancasila (Somantri, 2001: 279).

Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 2016: 1) menyebutkan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan siswa menjadi warga negara yang baik yang memiliki rasa kebanggaan terhadap Negara Indonesia, cinta tanah air, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan rumah, sekolah, dan sekitarnya serta berbangsa dan bernegara. Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh empat konsensus kebangsaan yaitu 1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa; 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kesepakatan final bentuk negara Republik Indonesia; (4) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud filosofi kesatuan dalam keberagaman yang melandasi dan mewarnai harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara



## B. Konsep Multikultural

Multikultural bukanlah suatu pengertian yang mudah untuk dirumuskan karena mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu multi yang berarti plural (beragam) dan kultural yang berarti kultur atau budaya (Rehayani, 2012: 210). Akar kata multikultural adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikultural dibentuk dari kata multi (banyak), dan kultur (budaya). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik (Mahfud, 2009: 75). Raimond Williams (Tilaar, 2004) menyatakan bahwa budaya merupakan salah satu istilah yang paling sulit dirumuskan di dalam kamus bahasa Inggris. Padahal budaya memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat karena budaya merupakan alat perekat di dalam suatu komunitas. Oleh sebab itu negara memerlukan politik kebudayaan untuk mempersatukan bangsa yang sedemikian beragam termasuk negara kita yang dikenal sebagai negara yang memiliki kultur dan budaya yang dirintis oleh *founding fathers* bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata semboyan hidupan bangsa kita memperoleh tantangan terus menerus, apalagi di era globalisasi dewasa ini.

Munculnya kesadaran akan perlunya keberagaman dalam masyarakat multicultural akan sangat membantu menemukan titik temu ketika ada perbedaan pandangan sosial, ekonomi, maupun politik. Multikultural menurut Rawls (2001), adalah suatu masyarakat yang adil bukanlah hanya menjamin *the greatest happiness for the greatest number* yang selama ini dikenal dalam prinsip demokrasi, tetapi, masyarakat yang adil adalah adanya pengakuan dan penerimaan terhadap perbedaan dan keberagaman.

Musa Asy'arie (Mahfud, 2009: 103) berpendapat bahwa multikultural adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Keartifan itu segera muncul jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan diri sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, dan karenanya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, dipungkiri, apalagi dimusnahkan.

Upaya membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila: 1) Konsep multikultural menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; 2) kesamaan pemahaman diantara para ahli mengenai multikultural dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan 3) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini (Suparlan, 2002: 2).

Konsep multikultural tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikultural menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam





kesederajatan. Multikultural juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yakni politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, prinsip-prinsip etika dan moral dan tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang relevan (Suparlan, 2002). Sama halnya dengan Blum dalam Atmadja (2003) mengatakan bawa multikultural meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penelitian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Parekh (Hanum & Raharja, 2011: 115) mengartikan multikultural meliputi tiga hal. Pertama multikultural berkenaan dengan budaya, kedua merujuk pada keberagaman yang ada, ketiga berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran isme menunjukkan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dengan konteks masyarakat dengan beragam budaya. Dengan demikian, multikulturalisme adalah sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri yang diharapkan bekerja pada setiap orang dengan konteks masyarakat dengan beragam budaya.

### C. Konsep Pendidikan Multikultural

Hilda Hernandez dalam Mahfud (2010: 176) menyatakan bahwa pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, gender, agama, status sosial ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Dalam pandangan ini, pendidikan mestinya memberikan ruang untuk proses transformasi pengetahuan dan nilai-nilai multikultural dengan cara menciptakan penghormatan terhadap nilai-nilai multikultural dengan cara menciptakan penghormatan terhadap realitas yang beragam dari peserta didik.

Definisi pendidikan multikultural menurut Suzuki (1979: 47) adalah program pendidikan yang menyediakan sumber belajar yang jamak bagi pembelajar dan yang sesuai dengan kebutuhan akademik maupun sosial anak didik. Kebutuhan ini bisa sangat bervariasi karena perbedaan ras, jenis kelamin, etnisitas atau latar belakang kelas sosial siswa selain mengembangkan keterampilan akademis dasar mereka. Program ini akan membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang latar belakang mereka sendiri dan kelompok lain yang membentuk masyarakat kita. Melalui proses ini, program ini akan membantu siswa untuk menghargai dan menghargai keragaman budaya, mengatasi sikap etnosentris dan prasangka, dan



memahami faktor sosio-historis, ekonomi dan psikologis yang telah menghasilkan kondisi polarisasi etnik, ketidaksetaraan, dan keterasingan etnis kontemporer. Ini akan membantu mereka mengkonsepkan dan bercita-cita menuju visi masyarakat yang lebih baik dan memperoleh pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk memungkinkan mereka memindahkan masyarakat menuju persamaan dan kebebasan yang lebih besar, pemberantasan penghinaan yang merendahkan martabat dan ketidakberdayaan dan perkembangan yang berarti bagi identitas setiap orang.

Banks (2010: 3) menyatakan bahwa pendidikan multikultural setidaknya meliputi tiga hal, yaitu ide atau konsep, sebuah gerakan reformasi dalam bidang pendidikan, dan sebuah proses yang menggabungkan gagasan bahwa siswa (terlepas dari jenis kelamin, kelas sosial, dan etnis, ras atau budaya mereka) harus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah. Ide penting lainnya dalam pendidikan multikultural adalah beberapa siswa, karena karakteristik ini, memiliki kesempatan lebih baik untuk belajar di sekolah karena mereka saat ini terstruktur daripada siswa yang tergabung dalam kelompok lain atau memiliki karakteristik budaya yang berbeda.

Definisi pendidikan multikultural yang diadopsi Pramono (1999) didasarkan pada asumsi bahwa sekolah dapat memainkan peranan besar dalam mengubah struktur sosial sebuah masyarakat. Ini tidak berarti bahwa sekolah satu-satunya lembaga sosial yang dapat mengubah struktur sosial sebuah masyarakat, tetapi dalam pengertian ini bahwa sekolah dapat menjadi wahana atau menjadi sebuah alat bagi sebuah perubahan sosial dari masyarakat. Guru dapat membantu siswanya mengkonseptualisasi dan menumbuhkan aspirasi tentang sebuah struktur sosial alternatif serta memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk berubah. Definisi dan ujian inilah yang akan dikembangkan pada sekolah-sekolah yang memiliki latar belakang dan kebhinekaan sosio-historis, budaya, ekonomi dan psikologi.

Harapan dan cita-cita dari pendidikan multikultural menurut Pramono (1999:60) adalah:

1. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai pluralism budaya. Artinya pluralism budaya itu tidak hanya ditoleransi tetapi juga dirangkul dan keragaman pengalaman manusia itu diharapkan memberi kearifan.
2. Pendidikan multikultural merupakan sebuah alternatif daripada membiarkan anak memperoleh sendiri pengalaman pluralism budaya-sporadis dan fragmentaris. Karena cara seperti itu hanya akan menghasilkan distorsi dan inadekuasi
3. Pendidikan multikultural secara eksplisit mengakui dan menyambut keragaman dari warisan etnik yang ditemukan dalam diri setiap orang yang disebut "orang indonesia" dan oleh karena itu menolak pandangan bahwa sekolah harus berupaya mencairkan perbedaan kultural atau sebaliknya hanya mentoleransi pluralisme budaya
4. Pendidikan multikultural tidak memaksa atau menolak anak karena identitas suku, agama, rasa, golongan. Pendidikan multikultural yang direncanakan secara cermat akan cocok bagi semua anak, baik yang mencari maupun tidak mencari rasa identitas etnik mereka.
5. Pendidikan multikultural mengakui kebutuhan dan manfaat anak untuk berbagai bersama (*sharing*) diversitas warisan etnik mereka



6. Pendidikan multikultural mengakui pentingnya semua anak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi secara positif dan personal dengan anak-anak dari berbagai latar belakang sosio-ekonomi dan warisan budaya.
7. Pendidikan multikultural memberikan setiap siswa kesempatan untuk membantu berkembangnya *sense of self*.

Undang-undang sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberikan peluang terhadap konsep pendidikan multikultural, yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan yang mempertimbangkan nilai-nilai kultural masyarakat yang sangat beragam. Pengembangan kurikulum yang berdasarkan pendekatan multikultural menurut Hasan (2000: 522) dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti saat ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan, misi, dan fungsi setiap jenjang pendidikan dan unit pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar, filosofi konservatif seperti haruslah dapat di ubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan kemanusiaan peserta didik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan dunia. Filosofi kurikulum yang progresif seperti humanism, progresivisme dan rekonstruksi sosial dapat dijadikan landasan pengembangan kurikulum.
2. Teori kurikulum tentang konten (*curriculum conten*), haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substansf yang berisikan fakta, teori, generalisasi ke pengertian yang mencakup pula nilai moral, prosedur, proses dan keterampilan yang harus dimiliki generasi muda.
3. Teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan yang memerhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, yang hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia yang harus diseragamkan oleh institusi pendidikan.
4. Proses belajar yang dikembangkan untuk siswa harus pula berdasarkan proses yang memiliki tingkat isomorphism yang tinggi dengan kenyataan sosial. Artinya, proses belajar yang mengandalkan siswa belajar secara individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan cara belajar berkelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi positif positif. Dengan cara demikian, perbedaan antar individu dapat dikembangkan sebagai suatu kekuatan kelompok, dan siswa terbiasa hidup dengan berbagai budaya, sosial, intelektualitas, ekonomi, dan aspirasi politik.
5. Evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan. Alat evaluasi yang digunakan haruslah beragam sesuai dengan sifat, tujuan dan informasi yang ingin dikumpulkan. Penggunaan alternative assessment (portofolio, catatan observasi, wawancara) dapat pula digunakan.

Gay (Zamroni, 2011: 15) menyatakan bahwa amat keliru kalau melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Sebaiknya pendidikan multikultural diperlukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan multikultural dapat





diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga negara yang memiliki jiwa toleran, bersifat inklusif, mempunyai semangat kesetaraan, dan senantiasa berpendirian bahwa suatu masyarakat akan lebih baik apabila semua warga memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya.

Dengan demikian, pendidikan multikultural adalah upaya-upaya pendidikan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada peserta didik tentang perbedaan etnis, agama, bahasa, status sosial, gender, dan perbedaan lainnya yang tidak harus diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran, akan tetapi lebih efektif bila diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain seperti IPS, PKn, dan pelajaran lainnya. Inilah paradigma yang harus dipahami oleh setiap elemen pendidikan, sehingga implementasi pendidikan multikultural dalam pendidikan dan persekolahan tidak memerlukan prosedur yang rumit, tetapi yang diperlukan adalah kesadaran, kemauan, komitmen dan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satu bidang kajian yang dapat menjadi wahana pendidikan multikultural adalah pendidikan kewarganegaraan.

#### **D. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural**

Pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia penting untuk dikembangkan. Hal ini mengingat faktor kebhinekaan bangsa Indonesia dan faktor-faktor lain yang menjadi pengalaman bangsa Indonesia. Terjadinya peristiwa disintegrasi sosial dan konflik selama ini semakin perlu untuk diantisipasi secara tepat dan hal yang paling memungkinkan adalah melalui program yang berbasis pendidikan multikultural. Dalam konteks ini salah satu bidang kajian yang dapat menjadi wahana bagi pendidikan multikultural adalah pendidikan kewarganegaraan. Mahfud (2010: 224) menegaskan bahwa Indonesia sebagai Negara majemuk, baik dalam segi agama, suku bangsa, golongan, maupun budaya lokal, perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional. Perlahan PKn yang telah diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebaiknya disempurnakan dengan memasukkan pendidikan multikultural, seperti budaya lokal antar daerah ke dalamnya, agar generasi muda bangsa sebagai bangsa Indonesia. Budimansyah & Suyadi (2008: 331) mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam pendidikan multikultural karena PKn mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Chandra (2012: 13) sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang dan jenis sekolah secara pragmatik memiliki *psycho-pedagogis*, yaitu membina warga negara yang demokratis dalam ruang lingkup pendidikan di lembaga pendidikan formal maupun informal. Sapriya & Winataputra (2004: 12) menyatakan bahwa tugas PKn dengan paradigma barunya mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kekuatan kecerdasan warga negara (*Civic Intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*Civic Responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*Civic Participation*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional, melainkan juga dalam dimensi spiritual,



emosional dan sosial sehingga paradigma baru PKn bercirikan multidimensional. Oleh karenanya PKn dengan paradigma baru mengamatkan agar demokrasi dilaksanakan secara cerdas dan berbudaya. Jadi, bukan demokrasi yang dilaksanakan dengan cara memaksakan kehendak tanpa dikemas dalam bingkai peraturan perundang-undangan.

Menggagas pembelajaran PKn yang berbasis pendidikan multikultural ini merupakan satu metode dan strategi sederhana, dalam rangka menciptakan karakter anak bangsa yang bisa hidup dalam nuansa perbedaan. Menurut Malik Fajar (Nadiroh, 2006: 8) PKn berfungsi sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab Hal ini terjadi karena salah satu tujuan PKn adalah membangun karakter warga negara yang demokratis. Pendidikan demokrasi yang menjadi bagian dalam konten PKn akan tercapai jika komponen-komponen sosio-kultural Indonesia sebagai bangsa, dipahami sebagai kekayaan alam nusantara. Komponen-komponen sosio-kultural tadi diformulasikan dalam bentuk pendidikan multikultural. Oleh guru PKn sebagai mediator di kelas, harus mengkonstruksikan pembelajaran dengan sebuah pendekatan sederhana tapi penuh makna yaitu berbasis multikultural. Pembelajaran PKn sekaligus berisikan pendidikan multikultural bisa dan mudah dilaksanakan karena cirinya yang sederhana, bisa dan terjangkau karena bisa dilakukan langsung di kelas oleh guru bersama siswa. Dengan model sederhana ini diharapkan pembelajaran PKn akan lebih bermakna bagi siswa dan tetap menjadi muatan pembelajaran strategis dalam upaya membangun karakter bangsa yang menghargai keragaman.

Tujuan pengintegrasian pendidikan multikultural dalam PKn adalah agar setiap warga negara memberikan penghargaan terhadap keragaman, dan memberikan hak-hak yang sama bagi etnik minoritas, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional dan citra bangsa di mata dunia internasional. Oleh sebab itu materi yang disajikan adalah tentang hak-hak individual dan hak-hak kolektif dari setiap anggota masyarakat, yakni bahwa setiap individu termasuk dari masyarakat minoritas yang memiliki kebebasan untuk berkreasi, berkarya, bahkan untuk mengembangkan dan memajukan budayanya, menjunjung tinggi keadilan dan hak-hak minoritas, kebebasan berbicara dan keterwakilan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif, dan toleransi. Jadi, PKn berbasis pendidikan multikulturalisme adalah mata pelajaran yang menanamkan prinsip-prinsip multikultural yang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diterapkan dalam diri peserta didik baik dalam kehidupan di keluarga, sekolah, lingkungan maupun negara agar menjadi warga negara yang demokrasi, bertanggung jawab, menghargai keragaman dan menjunjung tinggi kebhinekaan. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan multikultural, proses pembelajarannya menekankan pada bagaimana memperlakukan siswa yang berbeda latar belakang sosial budaya dan kepentingannya. Dalam proses pembelajaran siswa dilatih untuk berpikir kritis dan demokratis sehingga mereka dapat menemukan konsep, prinsip dan nilai atas keberagaman. Pembelajaran PKn memuat materi multikultural dan mengajarkan nilai menghargai dan toleransi. PKn mempunyai peran penting untuk mempersiapkan anak didik agar dapat mengatasi berbagai kesulitan dan permasalahan yang mereka temukan dalam masyarakat multikultural, serta menghormati perbedaan sosial, kultur dan keberagaman budaya.



Perlu ditekankan kembali bahwa keberagaman tanpa adanya kesederajatan bukan multikultural, oleh karena itu pendidikan multikultural dengan pengertian tersebut harus dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang keanekaragaman dan kesederajatan kultur. Siswa harus memahami pemahaman bahwa tidak ada perbedaan nilai dan budaya antara etnik, agama, adat istiadat, antara orang Jawa, Sunda, Batak, Dayak, Sasak, Bugis, Madura dan seterusnya. Untuk dapat memahami konsep ini terlebih dahulu siswa harus memahami konsep hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, hukum dan politik

Sekolah sebagai bagian integral dari masyarakat, memiliki siswa yang karakteristiknya beragam sebagai cerminan dari masyarakatnya. Sekolah di kota-kota besar merupakan contoh yang paling tepat menunjukkan keberagaman budaya, agama, etnis bahasa dan sebagainya. Sekolah harus menaruh perhatian yang besar terhadap masalah ini. Karena undang-undang dan kurikulumnya sudah memfasilitasi ke arah pendidikan multikultural. PKn berbasis pendidikan multikultural tidak bermaksud untuk menyamakan keberagaman atau menyatukan budaya yang sangat beraneka ragam tersebut. PKn berbasis pendidikan multikultural bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman pada siswa agar mereka menyadari bahwa walaupun berbeda sosial dan budayanya, namun tetap satu yaitu sebagai warga Negara Indonesia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan sederajat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu tidak ada seorang pun warga negara yang lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari warga negara lainnya.

PKn berbasis multikultural sebagai wahana membina keberagaman masyarakat Indonesia menjadi sangat penting untuk diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam pendidikan Indonesia supaya setiap warga negara Indonesia bisa memaknai keragaman dengan tetap menghargai perbedaan, baik perbedaan individual (fisik, jenis kelamin, umur, warna kulit, dan tinggi badan), maupun perbedaan budaya, sosial, agama, bahasa, etnik dan golongan. Oleh karena itu perlakuan yang diberikan juga harus mempertimbangkan latar belakang budayanya. PKn tidak boleh menggeneralisasikan atau menyamaratakan orang yang berbeda-beda. Untuk itu maka PKn memegang peranan yang sangat penting dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik tapi justru sebagai dasar dalam bertoleransi dan menghargai keberagaman yang ada demi mewujudkan negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

#### IV. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berbasis pendidikan multikulturalisme adalah mata pelajaran yang menanamkan prinsip-prinsip multikultural yang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diterapkan dalam diri peserta didik baik dalam kehidupan di keluarga, sekolah, lingkungan maupun negara agar menjadi warga negara yang demokrasi, bertanggung jawab, menghargai keragaman dan menjunjung tinggi kebhinekaan. PKn berbasis multikultural sebagai wahana membina paradigma keberagaman tetap menghargai perbedaan, baik perbedaan individual (fisik, jenis kelamin, umur, warna kulit, dan tinggi badan), maupun



perbedaan budaya, sosial, agama, bahasa, etnik dan golongan. PKn berbasis multikultural memegang peranan yang sangat penting dalam membina keberagaman masyarakat Indonesia agar keberagaman tidak menjadi sumber konflik, tapi justru sebagai dasar dalam bertoleransi dan saling menghargai keberagaman yang ada demi mewujudkan Negara Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural dalam proses pembelajarannya harus mencerminkan multikultural sebagai cerminan suatu masyarakat multikultural. Oleh karena itu dalam proses pembelajarannya siswa harus didekatkan dengan masyarakat, kehidupan dan permasalahan dalam masyarakat. Siswa harus terbiasa dan telatih dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan keberagaman yang ada dalam masyarakat. Guru PKn harus melakukan transformasi diri dan restrospeksi diri untuk mempersiapkan dirinya mengawal dan mengajar dengan basis multikultural. Guru harus mendapat bimbingan dan arahan agar dapat berperan secara maksimal sehingga pendidikan multikultural dapat diimplementasikan melalui PKn dengan baik. Pendidikan multikultural baik dalam PKn maupun mata pelajaran lain sebaiknya ditingkatkan pelaksanaannya khususnya di daerah bekas konflik dan daerah yang memiliki keberagaman yang banyak guna mencegah terulangnya kembali konflik tersebut.

### Daftar Pustaka

- Arifin, C. (eds). (2017). *Polisi tangkap sembilan pelaku tawuran yang akibatkan satu tewas di Jembatan Pesakih*. Diunduh tanggal 23 November 2017 dari <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/22/polisi-tangkap-semilan-pelaku-tawuran-yang-akibatkan-satu-tewas-di-jembatan-pesakih>
- Atmadja, N. B. (2003). Multikulturalisme dalam perspektif filsafat Hindu. *Makalah* disajikan dalam Seminar Damai dalam Perbedaan. Singaraja: 5 Maret 2013.
- Banks, J. A. dan Banks, C. A. M. (2010). *Multicultural education: issues and perspectives*. New York: Wiley.
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K (2008). *PKn dan masyarakat multikultural*. Bandung: UPI.
- Chandra. (2012) *Penerapan model debat dalam pembelajaran budaya demokrasi untuk meningkatkan mengemukakan pendapat siswa (penelitian tindakan kelas pada pembelajaran PKn di kelas XI IPA 1 SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung)*. Bandung: UPI.
- Mahfud, C.(2009). *Pendidikan multi kultural*. Yogyakarta: Pustaka Bahasa.
- Mahfud, C. (2010). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanum, F. & Raharja, S. (2011). Pengembangan model pendidikan multikultural. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 04 (2).
- Hasan, H. (2000). Multikultural untuk penyempurnaan kurikulum nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. 026 (6), 510-523.



- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: an international comparison*. London: National Foundation for education Research.
- Nadiroh. (2008). *Prospek dan tantangan civil society di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Keluarga.
- Pramono, S. E. (1999). *Urgensi pendidikan multikultural dalam pendidikan IPS*. Makalah disampaikan pada Seminar dan Sarasehan Forum Komunikasi IX, Pimpinan FPIPS-IKIP dan JPIPS- FKIP/STKIP Se Indonesia. Singaraja: 1999.
- Rawls, J. (2001). *A theory of justice*. Cambrigde: The Belknap Press.
- Sapriya & Winataputra, U. S. (2004). *Pendidikan Keewarganegaraan: Model Pengembangan dan pembelajaran*. Bandung: laboratorium Pkn UPI Press.
- Somantri, N. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparlan, P. (2002). *Menuju masyarakat Indonesia yang multikultural*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suzuki, B. (1979). Multicultural education: what's it all about?. *Integrated. Education*. 17 (1-2), 47-48.
- Kemendikbud. (2016). *Silabus mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsyanawiyah (SMP/MTs) mata pelajaran pendidikan pancasila Dan kewarganegaraan (PPKn) kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Tim Viva. (2017). *Kronologi tawuran antar suporter di Bogor versi PSMS*. Diunduh tanggal 22 November 2017 dari <http://www.viva.co.id/bola/liga-indonesia/966254-kronologi-tawuran-antar-suporter-di-bogor-versi-psms>
- Tilaar, H. A. R. (2007). *Multikultural: tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zamroni. (2011). *Pendidikan untuk demokrasi: tantangan menuju Civil society*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.